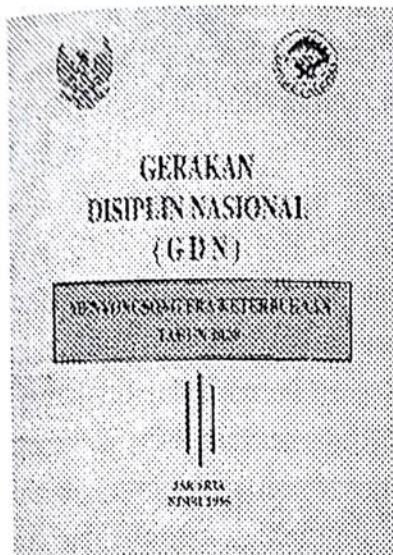


TIMBANGAN BUKU

MENUMBUHKAN KESADARAN GENERASI PENERUS

Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Menyongsong Era Keterbukaan Tahun 2020, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 1996, 233 halaman.



Peringatan 50 tahun Indonesia merdeka (1995) memiliki arti yang penting. Di samping kita dapat melihat dan menikmati hasil-hasil pembangunan, juga tahun itu mulai dicanangkan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) oleh pemerintah. Pencanangan GDN dilakukan oleh Presiden Soeharto bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1995.

GDN bertujuan untuk memberikan daya dorong yang kuat kepada seluruh masyarakat dan bangsa untuk: berpikir tertib, bersikap tertib, dan bertindak laku tertib, karena bangsa yang dapat maju dengan cepat adalah bangsa bangsa yang berdisiplin tinggi. Sebaliknya, hanya bangsa yang berdisiplin tinggi pula yang dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

Tentu saja, disiplin nasional tidak tumbuh dengan sendirinya. Ia lahir dari disiplin pribadi, kelompok, golongan, dan masyarakat. Presiden Soeharto mengingatkan, bahwa dicanangkannya GDN bertepatan dengan tanggal 20 Mei tersebut karena tanggal itu menandainya dibentuknya organisasi modern sebagai alat perjuangan untuk membangun masa depan sebagai bangsa yang terhormat. Hari itu adalah cikal bakal lahirnya tekad untuk membangun negara kebangsaan yang merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kesadaran bangsa juga tidak timbul sekali jadi. Kehidupan kebangsaan yang maju adalah karya bersama yang memakan waktu sangat panjang, dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. Kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita saat ini adalah prestasi dari generasi ke generasi. Setiap langkah maju generasi yang dicapai suatu generasi bertumpuh pada prestasi yang dibangun oleh generasi pendahulunya. Kita memelihara kehidupan bangsa itu dengan menekuni dan menghayati semangat dan cita-cita kebangsaan. Kita semuanya, setiap kalangan, golongan, dan lapisan masyarakat harus

menempatkan diri sebagai bagian menyeluruh dari bangsa Indonesia yang besar ini. CV Novindo Pustaka Mandiri sebagai penerbit dari buku ini (dikomandoi oleh Suhedi Hendro) mencantumkan sambutan Presiden itu pada bagian awal buku ini.

Langkah selanjutnya dari GDN adalah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Panitia Gerakan Disiplin Nasional (tanggal 23 Mei 1995). Dalam salah satu konsideransnya disebutkan bahwa sikap dan perilaku yang baik dan benar dari para penyelenggara negara beserta seluruh rakyat Indonesia dalam mematuhi dan melaksanakan hukum dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mempunyai peranan penting untuk keberhasilan pembangunan nasional. Peningkatan disiplin nasional tersebut harus dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam memberikan pelayanan bagi rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, GDN melibatkan 15 menteri yang dikoordinasikan oleh Menko Bidang Politik dan Keamanan, dengan anggota: Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Kehakiman, Menteri Penerangan, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Panglima ABRI, dengan Sekretaris: Sekmen Koordinator Bidang Polkam. Dengan keterlibatan sebagian besar menteri dalam kabinet ini diharapkan gerakan tersebut dapat mencapai sasaran yang diinginkan, karena sebagian tugas dari panitia ini adalah menggerakkan seluruh potensi masyarakat untuk turut berperan serta dalam GDN serta mengendalikan dan mengawasi rencana program dan pelaksanaan kegiatan GDN di pusat dan daerah. Dalam Penjelasan Umum Keppres di atas juga disinggung, bahwa dalam era globalisasi pada akhir Abad XX dan era perdagangan bebas pada awal Abad XXI (tepatnya tahun 2020), terwujudnya disiplin nasional bangsa Indonesia yang handal dan mantap merupakan kebutuhan mendesak dan salah satu prasyarat utama dalam peningkatan sumber daya manusia dan kelangsungan keberhasilan pembangunan nasional. Disiplin nasional menjadi sikap dan perilaku seluruh lapisan masyarakat beserta seluruh penyelenggara negara agar pembangunan nasional dapat berhasil secara berkelanjutan. Disiplin nasional itu sendiri hanya dapat terwujud melalui proses pemahaman, penghayatan, dan pengamalan hukum dan norma-norma yang berlaku, yang hasilnya tercermin pada perilaku disiplin pribadi dari setiap individu warga (hlm. 128).

Kenyataan dewasa ini disiplin masyarakat kita masih memprihatikkan. Hal itu terbukti dari terus berlangsungnya berbagai macam sikap dan perilaku yang kurang patuh dan kurang tertib terhadap hukum dan norma-norma lainnya.

Di samping itu masih ada anggapan yang keliru dari sekelompok masyarakat, yang mengatakan disiplin itu semata-mata milik ABRI. Anggapan keliru ini harus dihilangkan. Oleh karena itu, memacu kegiatan pembinaan disiplin nasional yang baik dan mantap, diperlukan adanya gerakan yang bersifat nasional sebagai suatu proses yang terencana, terpadu, terarah, terukur, bertahap, berlanjut, dan terkendali, sehingga terbentuk sikap dan perilaku yang didasari oleh kesadaran, keikhlasan, keyakinan, dan rasa membunuh bagi seluruh anggota masyarakat Indonesia untuk melaksanakan segenap hukum dan norma kehidupan yang berlaku. Pada gilirannya, diharapkan dapat diwujudkan disiplin nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya bangsa Indonesia yang dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945. Kondisi disiplin saat ini antara lain dapat kita lihat di tempat-tempat pelayanan umum dan di jalan-jalan yang rawan kemacetan lalu lintas. Kondisinya sangat semrawut, sehingga tidak sedikit menimbulkan kerugian waktu, dana, bahkan jiwa, di samping juga memberikan citra negatif tentang bangsa Indonesia.

Budaya bersih, khususnya dalam hal membuang sampah, saat ini juga masih menyedihkan. Ini dapat dilihat dari masih banyaknya anggota masyarakat yang membuang sampah sembarangan, bahkan ada yang membuangnya ke sungai atau ke selokan, sehingga pada setiap musim hujan menimbulkan banjir.

Budaya kerja juga masih dapat dikatakan rendah. Indikatornya tampak dari masih banyaknya penggunaan waktu yang tidak produktif oleh sebagian aparatur negara di berbagai instansi. Di samping itu ada kecenderungan orientasi yang bukan mengarah kepada meraih produktivitas organisasi melainkan kepada perolehan-perolehan lain yang menguntungkan diri sendiri. Di berbagai instansi pemerintah masih banyak terjadi penyalahgunaan wewenang pemborosan waktu dan dana, serta berbagai bentuk penyimpangan lain yang merugikan negara maupun masyarakat. Pelayanan umum oleh instansi pemerintah belum mencapai sasaran yang diinginkan, sehingga masih terdapat berbagai keluhan dan pengaduan dari masyarakat (hlm. 131-132).

Yang menarik dari buku ini untuk disimak adalah adanya masalah-masalah yang dihadapi untuk mewujudkan disiplin nasional yang mantap adalah yang bersumber dari aparatur pemerintah dari adanya oknum yang kurang profesional, bermental kurang baik, menyalahgunakan wewenang, tidak tegas dalam mengambil keputusan. Di samping itu juga bersumber dari masyarakat yang dapat dilihat dari masih banyaknya yang belum memahami pentingnya disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masih adanya anggota masyarakat yang belum memahami pentingnya disiplin dalam kehidupan masyarakat yang tidak berkeinginan untuk mengetahui peraturan yang berlaku, bermental kurang baik, dan yang terpaksa melakukan pelanggaran karena desakan keadaan. Masih adanya masyarakat pada umumnya acuh tak acuh terhadap pelanggaran yang

dilakukan, dilihat dan disaksikannya. Yang berumber dari pimpinan formal dan informal dapat dilihat dari adanya oknum pemimpin yang kurang memberikan teladan, kurang peka dan peduli terhadap situasi lingkungan kerja serta kurang melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Masalah disiplin nasional yang bersumber dari hukum dan norma dapat dilihat dari adanya petunjuk pelaksanaan dan dipatuhinya semua hukum dan norma secara konsekuen, konsisten, dan tanpa pandang bulu. Dilihat dari metodenya, belum terlaksananya law enforcement secara tuntas dari semua hukum dan norma yang berlaku.

Hal yang menarik antara lain yang diungkapkan dari buku ini adalah adanya program yang jelas, sehingga dengan mudah dapat dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat, baik berupa program jangka pendek maupun panjang. Misalnya, dalam program jangka pendek diefektifkan tiga budaya: budaya tertib (antri), budaya bersih (buang sampah pada tempatnya), dan budaya kerja (menyelesaikan pekerjaan dengan baik dengan mengutamakan tepat waktu dan mempunyai rencana kerja harian). Adapun untuk jangka panjang kegiatan berupa memberikan motivasi, dedikasi, dan pembinaan melalui jalur keluarga, keagamaan, sekolah, masyarakat, dan pekerjaan, sesuai dengan dinamika dan kesinambungan dan selalu mampu untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan. Penanggung jawab pembinaan di jalur keluarga adalah kepala keluarga, di jalur keagamaan oleh Menteri Agama, di jalur sekolah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di jalur masyarakat oleh Menteri Dalam Negeri, dan di jalur pekerjaan oleh Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (hlm. 140).

Yang lebih menarik terdapat pada bagian akhir buku ini, yakni dengan ditampilkan pesan-pesan kepada masyarakat tentang kebersihan lingkungan dengan berbagai macam gambar dan kegiatan yang mendukung GDN, antara lain kebersihan perorangan, tempat buang air, halaman pekarangan, ruang belajar yang baik, tempat sampah, lingkungan sekolah, dan sebagainya. Buku ini sangat bermanfaat untuk dibaca, diketahui, dan diamalkan oleh seluruh anggota masyarakat, baik yang ada di desa maupun di kota, dengan berbagai latar belakang profesi dan pekerjaannya. Sasaran yang paling utama, tentu saja kepada generasi muda, generasi penerus bangsa.

Ali Yunus